

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang berjalan dengan baik, hemat, dan mementingkan kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelurahan sebagai perangkat kecamatan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut menjadikan kelurahan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan publik, tetapi juga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah mengalokasikan dana kelurahan yang pemanfaatannya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana kelurahan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan. Dana kelurahan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian dialokasikan kepada kelurahan

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan dana kelurahan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana kelurahan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi menjadi aspek penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memperoleh informasi mengenai penggunaan dana kelurahan. Keterbukaan informasi tersebut dapat mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban aparatur kelurahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat serta pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana pada tingkat kelurahan maupun desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2024, pada tahun 2024 Komisi Informasi Pusat menerima 90 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan menyelesaikan sebanyak 129 register sengketa informasi. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses masyarakat terhadap informasi publik masih menjadi bagian penting dalam

pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia (Komisi Informasi Pusat, 2025, hlm. 18–20). Oleh karena itu, keterbukaan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan publik menjadi salah satu aspek yang penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Permasalahan pengelolaan anggaran pada tingkat pemerintahan lokal juga tercermin dalam hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024, ICW mencatat bahwa sektor Desa dan APBD Tingkat Bawah menjadi salah satu sektor yang memiliki jumlah kasus korupsi tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat tetap memiliki risiko penyimpangan apabila tidak didukung oleh mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik yang memadai. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran menjadi penting sebagai salah satu bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi tersebut juga relevan dengan pengelolaan dana pada tingkat kelurahan di Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon memiliki program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang bersumber dari APBD dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Pengaturan mengenai alokasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DPWKel antara lain dituangkan dalam Peraturan

Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015. Keberadaan program tersebut menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pada tingkat kelurahan. Namun, pengalokasian anggaran perlu diikuti dengan pengelolaan yang tertib, transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengelolaan APBD di Kota Cilegon juga menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten. BPK Perwakilan Provinsi Banten mencatat adanya pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 pada Pemerintah Kota Cilegon dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 50/LHP/XVIII.SRG/12/2024. Selain itu, BPK juga mencantumkan pemeriksaan terinci mengenai efektivitas pengelolaan APBD dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Cilegon.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Cilegon, termasuk pelaksanaan kegiatan pada tingkat kewilayahan, memerlukan perhatian terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini menjadi semakin penting karena realisasi pelaksanaan DPWKel juga digunakan sebagai salah satu indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat dikelola secara tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi yang jauh lebih spesifik dan kompleks dapat diidentifikasi pada fenomena di Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon. Kelurahan Kedaleman dinilai menghadapi tantangan, baik pada sisi administratif anggaran maupun respons sosial dari masyarakatnya. Fenomena ini terlihat jelas dari data anggaran dan realisasi dana kelurahan pada periode anggaran terbaru berikut:

Tabel 1. 1
Tabel Data Anggaran dan Realisasi Dana Kelurahan Kedaleman Periode 2023-2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Kelurahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / SILPA (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2023	2.943.304.679	2.887.000.041	56.304.638	98,09 %
2024	3.025.054.412	1.141.556.738	1.883.497.674	37,73 %
2025	2.305.996.222	2.056.593.796	249.402.426	89,18 %

Sumber Data : Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2024, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 37,73% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan pagu yang tersedia. Kondisi ini dapat menjadi

indikasi awal adanya tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta proses pengelolaan anggaran pada tingkat kelurahan. Rendahnya tingkat realisasi anggaran juga dapat berimplikasi terhadap optimalisasi pencapaian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat apabila tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif.

Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran yang rendah belum dapat secara langsung menunjukkan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan. Rendahnya realisasi anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, maupun faktor lainnya. Oleh karena itu, kondisi realisasi anggaran sebesar 37,73% tersebut diposisikan sebagai fenomena awal yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini selanjutnya menguji apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan, serta mengidentifikasi hubungan antarvariabel tersebut berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden.

Kesenjangan dalam data anggaran di atas memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola keuangan pada tingkat kelurahan, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi tersebut, peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Kelurahan Kedaleman pada tanggal 4 Mei 2026. Observasi dilakukan dengan mengamati sarana penyampaian informasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan, terutama

informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan realisasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat observasi, peneliti belum menemukan papan informasi yang secara khusus menyajikan informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan secara terperinci, seperti alokasi anggaran, rencana kegiatan, penggunaan dana, dan realisasi anggaran. Temuan tersebut merupakan hasil observasi awal peneliti dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di Kelurahan Kedaleman tidak transparan secara keseluruhan. Observasi awal tersebut digunakan sebagai indikasi empiris untuk melihat bagaimana informasi mengenai pengelolaan dana disampaikan kepada masyarakat. Keterbatasan informasi yang ditemukan pada sarana dan media yang diamati menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Kedaleman.

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana publik menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang memadai untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana, sedangkan akuntabilitas diperlukan agar setiap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, partisipasi masyarakat diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan,

terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, memperoleh manfaat dari kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Di samping permasalahan empiris yang ditemukan di lapangan, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memperkuat pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Tresya Pardede mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening pada Kecamatan Medang Deras menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat, yang selanjutnya dapat mendukung pencapaian pembangunan desa. Hasil yang lebih relevan dengan penelitian ini ditunjukkan oleh Nurila Ramadani U dalam penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang. Penelitian tersebut menemukan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan, sedangkan transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Meskipun demikian,

secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan transparansi belum tentu secara langsung menghasilkan pengelolaan dana kelurahan yang lebih baik, sementara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat menunjukkan peranan yang lebih kuat dalam pengelolaan dana kelurahan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana pada tingkat pemerintahan lokal. Penelitian Wiwi Tresya Pardede menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian Nurila Ramadani U menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana kelurahan, meskipun akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Perbedaan temuan tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*) yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai apakah partisipasi masyarakat dapat menjadi mekanisme yang menjembatani pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan. *Research gap* dalam penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan fokus dan model penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Pardede (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pembangunan Desa dengan

Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Intervening pada Kecamatan Medang Deras telah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan pembangunan desa. Namun, variabel dependennya adalah pembangunan desa, sehingga penelitian tersebut belum secara spesifik menguji peran partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana Kelurahan.

Sementara itu, Ramadani U (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang telah menguji akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Kelurahan. Namun, penelitian tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pada model penelitian, yaitu belum secara spesifik diuji apakah partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dengan mengintegrasikan kedua fokus penelitian tersebut ke dalam satu model, yaitu transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen, partisipasi masyarakat sebagai

variabel intervening, dan pengelolaan Dana Kelurahan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai mekanisme peran partisipasi masyarakat dalam menjembatani pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan melalui Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Intervening di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?
5. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?

6. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel *intervening* di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?
7. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel *intervening* di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon
5. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon
6. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat

sebagai variabel *intervening* di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon

7. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel *intervening* di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan daerah, dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana kelurahan. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah melalui pengujian peran partisipasi masyarakat sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan. Pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai apakah keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana secara langsung maupun secara tidak langsung melalui keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan publik pada konteks pemerintahan kelurahan di wilayah perkotaan, khususnya di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan pengelolaan dana kelurahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kelurahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan Sebagai bahan evaluasi dan masukan objektif bagi aparatur kelurahan untuk memperbaiki sistem keterbukaan informasi publik, meningkatkan kedisiplinan akuntabilitas pelaporan, serta menyusun strategi pengelolaan dana yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, kajian pustaka, atau perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik sejenis dengan model variabel *intervening* pada fokus pemerintahan tingkat kelurahan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan untuk penelitian ini dapat dibagi dalam bab- bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan juga hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini di uraikan metode penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab–bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran–saran terhadap kesimpulan tersebut serta saran–saran bagi penelitian selanjutnya.